

**PERBANDINGAN PENGELOLAAN BUMK
(Badan Usaha Milik Kampung) KAMPUNG
BENGGERIS DAN KAMPUNG CEMPEDAS
KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN
KUTAI BARAT**

Hadi Sefandi

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume , Nomor , 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul : Perbandingan Pengelolaan BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) Kampung Benggeris dan Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat

Pengarang : Hadi Sefandi

NIM : 1902026130

Program Studi : S1 Pemerintahan Integratif

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Pemerintahan Integratif Fisip Unmul.

Samarinda, 31 Juni 2023

Pembimbing,



Budiman, S.IP., M.Si

NIP. 19770712 200501 1 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 PIN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Pemerintahan Integratif	Bagian Perpustakaan S1 PIN
Volume :	
Nomor :	
Tahun : 2023	
Halaman :	Ruth Patiung, S.E.

PERBANDINGAN PENGELOLAAN BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) KAMPUNG BENGGERIS DAN KAMPUNG CEMPEDAS KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT

Hadi Sefandi¹, Budiman²

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis Perbandingan Pengelolaan BUMKA (Badan Usaha Milik Kampung) Kampung Benggeris dan Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Temuan studi menunjukkan bahwa fungsi BUMK telah dijalankan secara efektif di kampung Cempedas dan untuk di kampung benggeris belum berjalan baik secara administratif untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan ekonomi masyarakat Kampung Benggeris dan Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dapat sepenuhnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan ekonomi. Dalam menjalin hubungan yang serasi dan seimbang antara kebutuhan dan pelaksanaan program yang sedang berlangsung masyarakat Kampung Benggeris dan Kampung Cempedas untuk memenuhi kondisi, ada kebutuhan untuk memperkuat metode persuasi dari setiap peran yang dilakukan.

Kata kunci : *pengelolaan BUMK, produktivitas masyarakat.*

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hadisefandi2@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

BUMK merupakan salah satu komponen pelaksana peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pengertian BUMK yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: BUMKam, singkatan dari “Badan Usaha Milik Kampung”, adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk tujuan pengelolaan aset, jasa, dan usaha lain untuk kepentingan masyarakat Kampung.

BUMKA juga merupakan salah satu organisasi untuk berupaya agar masyarakat kampung lebih berpengetahuan luas dan mampu berdaya saing dengan masyarakat luar meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, di dalam bidang-bidang tertentu guna membantu masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan sekitar maupun di lingkungan luar kampung ters ebut dan memberikan peluang kerja kepada masyarakat. Dari penjelasan diatas yaitu tentang BUMKA (Badan Usaha Milik Kampung).

Badan Usaha Milik Kampung dan dikelola oleh masyarakat yang ada di kampung tersebut dengan struktur yang jelas dan ada Surat Keterangan (SK) untuk memanfaatkan sumber daya, aset dan jasa ketenagakerjaan dalam pelayanan kepada masyarakat yang ada di kampung dan melakukan pengelolaan fisik kampung yang ada agar lebih maju, agar dalam pengelolaan program-program kerja yang ada baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang agar berjalan aktif bukan hanya pada saat adanya Dana kampung akan tetapi program tersebut bersifat berkelanjutan atau berkesinambungan bisa juga disebut program yang berjalan terus-menerus/berkepanjangan demi kesejahteraan masyarakat di kampung tersebut.

Oleh sebab itu, Badan Usaha Milik kampung sangat penting dibentuk dalam kampung karena berperan baik dalam pengelolaan hasil kampung itu sendiri agar tidak terjadi penyimpangan dan dalam struktur pengelolaan manajemen atau pengendalian secara internal harus jelas dan teliti dalam menjalankan Badan Usaha Milik Kampung agar lebih terarah. Dimasa sekarang ini peranan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKA) dalam menjalankan program yang direncanakan oleh pemerintah yang ada guna untuk memberantas atau menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran masyarakat yang ada di kampung tersebut. Tujuan struktur pengelolaan manajemen atau pengendalian secara internal adalah membantu Badan Usaha Milik Kampung atau organisasi dapat:

- 1) Tujuan BUMKA yang ditetapkan akan dapat dicapai,
- 2) Laporan keuangan yang dihasilkan BUMKA dapat dipercaya,
- 3) Kegiatan BUMKA sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Pemendes PDDT No.4 Tahun 2015).

Kampung Benggeris ialah BUMKA yang berdiri di kampung ini tidak berjalan dengan baik atau bisa dikatakan berjalan dengan tidak semestinya dikarenakan tidak adanya anggaran untuk membuka dan mendirikan usaha di kampung terlebih lagi kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di kampung benggeris tersebut minimnya kualitas ataupun pengetahuan untuk pengelolaan dan praktek langsung ke lapangan, sedangkan BUMKA yang berdiri di Kampung Cempedas lebih mampu atau aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi BUMKA yaitu memanfaatkan sumber daya, aset dan jasa ketenagakerjaan dalam pelayanan.

Kerangka Dasar Teori

Perbandingan Badan Usaha Milik Kampung

Kata "perbandingan" berasal dari kata kerja bandingkan, yang berarti menimbang, khususnya memutuskan dari satu atau lebih dari setiap objek. Secara terus menerus kata pemeriksaan dapat disamakan dengan kata berpikir, tepatnya demonstrasi memutuskan sesuatu atau beberapa hal dimana oleh karena itu artikel atau artikel disamakan dengan alat korelasinya.

Dengan menggunakan alat perbandingan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan adalah proses membandingkan satu atau lebih hal. Dari pemeriksaan ini, persamaan dan perbedaan bisa didapat dari pertarungan atau item dengan gadget korelasi atau mulai dari perbedaan pendapat yang satu ke yang berikutnya. Mengenai pemerintahan, tentu yang dilihat adalah kewenangan publik suatu negara tertentu dengan bangsa yang berbeda. Ada pemerintah daerah di kota ini.

Badan Usaha Milik Kampung

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) pada dasarnya adalah organisasi yang dibentuk oleh kota. Untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, BUMDes “harus didirikan. Sementara itu, pengertian BUM Kampung dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (6) yang menyatakan bahwa: Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disinggung BUMKam adalah unsur usaha yang modalnya seluruhnya atau pada umumnya diklaim oleh kampung melalui kerjasama langsung yang dimulai dari sumber daya kampung yang terisolasi untuk mengawasi sumber daya, administrasi, dan organisasi lain untuk bantuan pemerintah” yang paling ekstrim dari wilayah lokal kampung. Dalam hal ini Pasal 87 Perda tersebut menyatakan bahwa BUMKam dapat dibingkai oleh pemerintah kota yang diawasi dari rasa kekeluargaan dan partisipasi bersama untuk menggunakan seluruh kemampuan keuangan reguler dan SDM untuk menggarap bantuan pemerintah daerah. daerah setempat kampung yang bersangkutan.

BUMKam “merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah kampungserta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi kampung. BUMKam dibentuk berlandaskan” atas peraturan

“perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat kampung. Tujuan BUMKam adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian kampung. BUMKam memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat”.

Pemerintah

Pemerintah adalah asosiasi yang memiliki kekuatan untuk membingkai dan melaksanakan peraturan dan pedoman di daerah tertentu. Jadi untuk keadaan ini pejabat publik adalah badan atau organisasi publik yang bertugas memahami tujuan dasar Negara dimana jabatan itu harus diberi kekuasaan untuk melakukan administrasi dan koordinasi pemerintahan dan pengurus di arena publik dari berbagai yayasan di mana mereka ditetapkan. Kewenangan publik dalam perspektif luas adalah semua perangkat kepala, pejabat, dan pelaksana hukum negara yang tugasnya menjalankan kerangka kewenangan publik, sedangkan kewenangan publik dalam perspektif sempit hanyalah lembaga pimpinan.

Menurut Wilson (1903:572), pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian yang tidak selalu terkait dengan organisasi angkatan bersenjata melainkan dua atau lebih individu dari berbagai kelompok yang diorganisir oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan mereka dengan memperhatikan kepentingan publik urusan.

“Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi Pemerintah serta pengelolaan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat”.

Pemerintah Kampung

Pemerintah Kampung “atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat kampung. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan kampung yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kampung memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan kampung merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada perkampungan. Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Pemimpin pemerintah” kampung, seperti

tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala kampung yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pengelolaan, dan kemasyarakatan.

Kampung memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan kampung merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pekampungan. Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Manajemen

“Menurut James A.F. Stoner sebagaimana dikutip Handoko pengertian manajemen adalah sebagai berikut: “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Dari definisi tersebut terlihat bahwa Stoner mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun proses yang dimaksud dalam pengertian manajemen menurut” A.F Stoner yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan memiliki arti bahwa manajer memikirkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Berbagai kegiatan ini didasarkan pada berbagai metode, rencana atau logika.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun material untuk mencapai tujuan organisasi. Koordinasi sangat penting bagi perusahaan karena semakin terkoordinasi dan terintegrasi kerja suatu organisasi maka semakin efektif pencapaian tujuan organisasi.

c. Pengarahan

Pengarahan berarti bahwa para manajer mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi para bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri namun menyelesaikan tugas melalui orang lain.

d. Pengawasan

Pengawasan berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak sesuai tujuannya.

“Menurut Aldag dan Streamns sebagaimana dikutip Alma dan Priansa, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian dan pengelolaan staf, kepemimpinan, dan pengawasan dalam organisasi yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan”.

Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang ada, penulis akan lengkap dan dapat dilihat bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bisa menjadi jenis penelitian subjektif, lebih spesifik dengan memanfaatkan pusat penyelidikan dan dengan menggunakan strategi untuk menyelidiki dan mendapatkan itu berarti bahwa sejumlah orang atau sekelompok individu memuji masalah sosial atau kasih sayang. Penyelidikan subjektif tentang persiapan ini mencakup upaya penting, seperti pertanyaan dan strategi bertanya, mengumpulkan informasi tertentu dari anggota, menganalisis informasi secara induktif dari subjek tertentu ke topik umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini menggabungkan struktur atau sistem yang dapat disesuaikan.

Model metodologi subyektif dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan menarik yang melibatkan penyelidikan kontekstual sebagai pusat eksplorasi, yang mengoordinasikan pemeriksaan menuju titik pemaknaan dan penggambaran Korelasi Tata Kelola BUMKA di Kota Benggeris dan Kota Cempedas, Muara Lawa Lokal, Rezim Kutai Barat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbandingan Pengelolaan BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) Kampung Benggeris dan Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

Handoko mengutip James A.F. Stoner memberikan definisi manajemen sebagai berikut: Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dikenal sebagai pengelolaan. Siklus tersebut disinggung dalam perasaan para eksekutif menurut A.F. Stoner:

a. Perencanaan

Perencanaan “memiliki arti bahwa manajer memikirkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Berbagai kegiatan ini didasarkan pada berbagai metode, rencana atau logika”. Dalam perencanaan program yang dibahas ini melalui beberapa tahapan yaitu dari usulan-usulan per-RT yang sudah dirembukkan di RT yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Kampung. Selanjutnya, dilakukan rapat beberapa kali dengan peserta rapat warga kampung dengan Pemerintah Kampung sebagai fasilitator dari pelaksanaan rapat tersebut. Setelah itu, dilakukan rapat lagi dengan peserta rapat Pemerintah Kampung dengan tiap-tiap Ketua RT yang dengan beberapa usulan tersebut diringkaskan dalam rapat ke-3.

Jadi, proses dalam perencanaan program *pengelolaan BUMKam sarang burung walet, toko sembako dan alat tani* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Usulan program dari tiap-tiap RT
2. Usulan program dari RT ke Pemerintah Kampung dan dilanjutkan ke Pemerintah Kecamatan
3. Rapat pertama
4. Rapat Kedua
5. Rapat Ketiga

b. Pengorganisasian

Pemilahan menyiratkan bahwa mengoordinasikan aset yang diklaim baik manusia maupun aset material untuk mencapai tujuan hierarkis. Koordinasi sangat penting untuk bisnis karena semakin terintegrasi dan terkoordinasi pekerjaan organisasi, semakin baik dalam mencapai tujuannya. Program prioritas Pemerintah Kampung Cempedas dan Kampung Benggeris untuk dijalankan dan dikelola baik lembaga maupun masyarakat kampung seperti ternak babi bali dikelola oleh per-KK yang ada di kampung benggeris yang diserahkan secara langsung dari pemerintah kampung.

c. Pengarahan

Bawahan diarahkan, dipimpin, dan dipengaruhi oleh manajer melalui arahan. Direktur tidak melakukan segala jenis gerakan sendiri namun menyelesaikan tugas melalui orang lain. Dalam pengarahan sebuah organisasi yang ada di BUMKam kampung Cempedas dan BUMKam Kampung Benggeris ini selalu fokus pada saran dan perintah terutama membimbing masyarakat yang kurang berpengalaman dalam mengelola agar yang menjadi kendala BUMKam dan pemerintah memberikan akses pelatihan untuk masyarakat lebih memahami tugas dan tanggung jawab nya dalam memegang jabatan untuk dapat diperbaiki dan saran yang ada sehingga dapat termotivasi bekerja lebih giat untuk tercapainya tujuan dari BUMKam.

d. Pengawasan

Menurut Terry (dalam Torang, 2013: 177) manajemen sebagai komponen kontrol akan mencatat perbaikan organisasi menuju tujuan normal dan memberdayakan para pionir untuk membedakan penyimpangan dari pengaturan sehingga melakukan langkah restoratif sebelum melewati titik yang memungkinkan. untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan dan diantisipasi tanpa henti. Mengingat Pedoman Pendeta Rumah Masalah Nomor 39 Tahun 2010 pasal 23 tentang Pengawasan bahwa BPD atau calon pengurus dalam dibingkai melalui pemikiran kampung mengarahkan administrasi BUMKam. Pedoman tersebut disegarkan dengan pengembangan Pedoman Town Priest No. 4

Tahun 2015 pasal 10 yang menyatakan bahwa bos harus memperhatikan kepentingan daerah dan bos harus memiliki struktur administrasi yang terdiri dari direktur, eksekutif delegasi, sekretaris dan individu. Sesuai Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 pasal 32 disebutkan bahwa Pejabat/Ketua Kota melakukan pengarahan, pemeriksaan dan penilaian terhadap kemajuan pengurus dan SDM yang membawahi BUMKam.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei lapangan, dapat ditarik kesimpulan mengenai Perbandingan Pengelolaan BUMKA Kampung Benggeris dan Kampung Cempedas, Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan program Pengelolaan BUMKam dalam memberdayakan masyarakat di Kampung Benggeris masih terbatas beberapa warga masyarakat sedangkan di Kampung Cempedas warga masyarakat yang dapat diberdayakan lewat program BUMKam lebih banyak ketimbang Kampung Benggeris. Hal ini terlihat dari perencanaan Pengelolaan BUMKam: Warga Kampung telah memiliki panduan dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan BUMKam, tetapi perencanaan yang lebih umum masih terbatas pada individu.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian di kedua Kampung memiliki perbedaan seperti di Kampung benggeris masyarakatnya mengajukan peningkatan ekonomi, lingkungan, sedangkan di Kampung Cempedas masyarakat lebih mengajukan peningkatan ekonomi dan pemberdayaan pemuda dalam pengorganisasian. Di kedua Kampung tersebut memiliki Pengorganisasian yang baik dan kesadaran yang kritis. Hal ini terlihat dari kelemahan organisasi yang bersumber dari aparaturnya Tenaga kerja pemerintah masih belum memenuhi tingkat kemampuan yang dibutuhkan, sehingga pembagian tugas dalam pelaksanaan pengelolaan BUMKam masih belum optimal.

3. Pengarahan

Pengarahan dari Kampung Benggeris dan Kampung Cempedas Memiliki persamaan yaitu dengan membantu akomodasi dan administrasi untuk masyarakat dalam melaksanakan Pengelolaan dalam program BUMK yang ada. Masyarakat di dua kampung tersebut belum mampu secara efektif memajukan pengelolaan BUMKam. Jika dilihat dari cara kerja kepemimpinan kepala kampung, maka akan terlihat bahwa ia mendukung proses pengelolaan dan pelaksanaan.

4. Pengawasan

Pengawasan Pemerintah Kampung Benggeris dan Kampung Cempedas memiliki persamaan sebagai mediator, sosialisator, dan pengawas dari program pengelolaan BUMK yang telah dilaksanakan. Pembinaan masyarakat di bawah pengawasan belum berhasil. Bina lingkungan di dua Kampung tersebut sudah digunakan untuk pengelolaan BUMKam di seluruh RT atau setiap keluarga, namun belum ada tindakan lebih lanjut dari hasil pengawasan internal dan eksternal, sehingga hasil Pengelolaan BUMKam belum dapat menentukan apakah masyarakat akan memperoleh manfaat dari hasilnya.

Program pengelolaan BUMK Kampung Cempedas lebih berhasil melalui sarang burung walet, ruko sembako, dan sentra penjualan tabung gas di kampung, sehingga semakin banyak minat masyarakat yang mengikuti kegiatan pengelolaan BUMK. Pelaksanaan program pengelolaan BUMK menunjukkan bahwa Kampung Benggeris merupakan Kampung mandiri Itu adalah sentra pertanian, perkebunan dan peternakan, tetapi kinerjanya tidak maksimal.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kampung Benggeris

Perangkat kampung dalam melaksanakan pengelolaan, kepala kampung harus mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Keharusan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan teknis sebelum program pengelolaan BUMKam dapat dilaksanakan. Dengan harapan agar program dapat sampai pada tujuan dan terlaksana dengan baik, mengingat daerah setempat telah mendapatkan sedikit pengalaman dan dilaksanakan untuk persiapan sebelum program untuk pengembangan. Pemerintah Kampung harus bisa mengurangi kesalahan dengan menjaga BPK dan LPM sebagai penanggung jawab program pengelolaan BUMKam di kampung Benggeris.

2. Bagi Pemerintah Kampung Cempedas

Diharapkan dapat mengelola belanja BUMKam dan mengelola usaha BUMKam dengan lebih baik kinerja keuangan BUMKam dengan menggunkan sumber-sumber pendapatan BUMKam terutama dari hutang usaha mengingat nilai DER yang cukup tinggi akan lebih baik atau berimbang. Walaupun sejauh ini pengelolaan dan pelaksanaan BUMKam di Kampung Cempedas sudah berjalan dengan baik.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Senantiasa bersama-sama untuk mendukung program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kampung baik Kampung Benggeris Maupun Kampung Cempedas agar mereka juga dapat ikut serta, misalnya

Perbandingan Pengelolaan BUMK (badan Usaha Milik Kampung).....(Sefandi)

mempersiapkan diri untuk lebih mengembangkan kemampuan di mana para wali berperan serta berperan sebagai pemulihan pengganti warisan sosial genealogis agar tidak hilang secara bertahap. Akan ada budaya yang tidak akan ada lagi jika tidak ada regenerasi.

Daftar Pustaka

- Widyastuti, Yuli. 2017. Peran badan Usaha Milik Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten lampung Tengah Persepektif Ekonomi Islam.
- Sri Anggraeni, R.R Maria. 2016. Peranan badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) pada Kesejahteraan Masyarakat Perkampungan
- Koso J, Ogotan M dan Mambo Rully, 2018. Manajemen Pengelolaan badan Usaha Milik Kampung (Studi di kampung Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). Unsrat volume 4 Nomor 5.
- Ihsan A.N dan Setiono B, 2018. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Kampung Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*. Volume 7 Nomor 4
- Safitri, I., Trisna, N., Ikhsan, I., & Hajad, V. (2021). Analisis Pengelolaan Badan usaha Milik Gampong (BUMG) dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Universitas Jambi*, 5(2), 39-47
- Mariana Dede, Paskarina Caroline dan Yuningsih Y Neneng. 2017. Perbandingan Pemerintahan . Jakarta : Universitas Terbuka.
- Ramadhan EkosariResdianto. 2021. Analisis Perbandingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMKam dengan Menggunakan PSAK EMKM dengan PSAK Entitas Privat: Studi Pada BUMKam Klirong Makmur, Kampung Klirong Kecamatan Klirong Kabupaten kebumen Tahun 2019 dan 2020. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Dokumen:

- Undang-Undang (UU) nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan kampung.
- Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2013/NO.24, TLD.2013/NO.161
Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung.

